

**Pengaruh Pemikiran Politik Hasan al-Banna dalam Partai Keadilan Sejahtera  
Pasca Reformasi di Indonesia Tahun 1998-2014**

**Oleh**

**Priandoko**

**Email : kho\_yieb@yahoo.co.id**

**Pembimbing: Dr. Muchid, S.Sos, M.Phil**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Riau**

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-

Telp/Fax. 0761-63277

**ABSTRACT**

*Religion as worldview has contributed few main roles on world politics constellation for decades. One of them is Hasan Al Bana's political thoughts, "Manhaj Harokah". This research analyzes the influence of Hasan al-Banna—the founder of Ikhwanul Muslimin—political thoughts in Indonesia. This research is aimed to describe how Indonesia through "Partai Keadilan Sejahtera" adopt Hasan al-Banna's thoughts on politics and governance.*

*Formulation of Hasan al-Banna's thoughts and vision about Islam and governance that has been adopted and absorbed in Indonesia will be explained based on Political Thought Theoretical Framework. These qualitative-descriptive research framework formulates ideology, actor, value system infiltration, institution, and political movement as one theoretical unity. Which means that, Hasan al-Banna's thoughts focus on these four research concepts.*

*The result of this research shows that Hasan al-Banna's political thoughts influence Indonesia political situation by the existence of "Partai Keadilan Sejahtera" as the da'wah-based party. PKS is Indonesian's manifesto on adopting Hasan al-Banna's thoughts. The establishment of PKS is one of two main influences on Indonesia political situation. And another one is Islam purification, getting back to "quran and hadits". Some previous researcher also called PKS establishment as the rise of "Jemaah Tarbiyah" in Indonesia.*

**Keywords:** *Hasan al-Banna, tarbiyah, dakwah, PKS*

## Pendahuluan

Islam adalah agama universal, agama yang membawa misi *rahmatan lil 'alamin* membawa konsep kepada manusia mengenai persoalan yang terkait sistem perekonomian, penegakan hukum, konsep politik, dan sebagainya.<sup>1</sup> Dalam bidang politik misalnya, Islam mendudukannya sebagai sarana penjagaan urusan umat (*ri'āyah syu-ūn al-ummah*). Islam dan politik integratif terwujud pada beberapa pemikir dan politisi muslim yang hadir dari masa ke masa dengan pemikiran dan pola perjuangannya yang berbeda-beda, salah satu diantaranya adalah Hasan al-Banna.

Hasan al-Banna merupakan tokoh pembaharuan pemikiran Islam yang juga pendiri sekaligus *Mursyid 'Aam* pertama Ikhwanul Muslimin. Bagi Hasan al-Banna pembaharuan itu boleh dilaksanakan asal tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.<sup>2</sup> Pemikiran pembaharuan Hasan al-Banna berdasarkan atas keyakinan bahwa Islam adalah agama universal yang sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, yang pada intinya dapat dikemukakan dalam lima aspek, yaitu: agama/moral, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan.<sup>3</sup>

Untuk mewujudkan pemikirannya tersebut, bersama para muridnya pada tahun 1928 Hasan al-Banna kemudian mendirikan organisasi Ikhwanul Muslimin setelah sebelumnya Hasan al-Banna mendirikan Asosiasi Pemuda Muslim (YMMA) serta menerbitkan jurnal mingguan untuk pembaharuan Islam bernama *al-Fath* bersama Muhibuddin al-Khatib, seorang pembaharu Suriah yang mengelola perpustakaan Salafiyah.<sup>4</sup>

Gerakan Ikhwanul Muslimin merupakan gerakan yang dinamis dan fleksibel, dimanapun Ikhwanul Muslimin berada maka ia bukan hanya menjelma sebagai sebuah organisasi keagamaan semata. Ikhwanul Muslimin diadopsi dan dipakai oleh sangat banyak tokoh dan organisasi Islam lainnya. Kekhasan dari gerakan Ikhwanul Muslimin ini akan memunculkan pergerakan masa yang sangat teratur dengan berbagai variasi bentuk-bentuknya, padahal sang pendiri Hasan al-Banna tidak pernah menulis sebuah buku. Adapun itu hanyalah kumpulan ceramah dan tulisan Hasan al-Banna yang dibukukan oleh para pengikutnya.<sup>5</sup>

Di berbagai negara Gerakan Ikhwanul Muslimin mampu mempertahankan eksistensinya dalam situasi tertekan dan tetap mempertahankan kekritisannya ketika memasuki lingkaran kekuasaan. Perkembangan dari gerakan ini menunjukkan bahwasanya ia memasuki wilayah perpolitikan praktis, meski dengan konsep yang berbeda. Di banyak tempat berubah menjadi partai-partai politik yang ikut memerintah suatu negara.<sup>6</sup> Yusuf Qardhawi bahkan menyatakan bahwa salah satu partai politik yang ada di Indonesia, Partai Keadilan merupakan perpanjangan tangan Ikhwanul Muslimin di Indonesia.<sup>7</sup> Hal tersebut belum termasuk pemikiran-pemikiran para tokohnya yang menjadi rujukan berbagai organisasi Islam di Indonesia.

Dinamika pemikiran dan gerakan politik Islam di Indonesia tidak pernah bisa dilepaskan dari dinamika pemikiran dan gerakan politik dunia Islam. Dalam konteks diskursus Kebangkitan Islam Timur Tengah, Hasan al-Banna berperan

<sup>1</sup> Fuad Mahbub Siraj, *Ibn Rusyd Cahaya Islam di Barat* (Jakarta: Dian Rakyat, 2012), hal.77

<sup>2</sup> Kurnia Ilahi, *Perkembangan Modern Dalam Islam* (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2012), hal.272.

<sup>3</sup> *Ibid*, hal.273

<sup>4</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga*

*Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2013), hal.189

<sup>5</sup> Aga Sekamdo, *Membumikan Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis atas Proses Internasionalisasi Gerakan Ikhwan* (Solo: Era Intermedia), hal.14

<sup>6</sup> Aga Sekamdo, *Op Cit*, hal.15

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.17

sebagai *sender* (pengirim) dan Indonesia berperan sebagai *receiver* (penerima), tetapi terlalu naif untuk menafikan peran masyarakat Indonesia dalam menjembatani proses tersebut, mengingat kondisi sosial dan politik Indonesia yang sangat plural dan dinamis, didukung dengan penduduk Indonesia yang menjadi salah satu negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Jika menelaah berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, masuknya nilai-nilai Hasan al-Banna ke Indonesia dapat dilihat melalui melalui tiga sarana utama. *Pertama*, peran alumni Timur Tengah. *Kedua*, peran lembaga pendidikan Islam. *Ketiga*, publikasi umum.<sup>8</sup>

Di Indonesia, Ikhwanul Muslimin semakin berkembang setelah Muhammad Natsir mendirikan partai yang ajarannya identik dengan Ikhwanul Muslimin, yaitu Partai Masyumi yang kemudian keberadaannya dilarang oleh Soekarno. Kemudian ketika Partai Masjumi dilarang pada tahun 1960 oleh Rezim Otoriter, tokoh-tokoh Masjumi termasuk M. Natsir kemudian mengalihkan perhatiannya ke aktivitas dakwah dan pendidikan, dan lalu mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967.<sup>9</sup> Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) melakukan pembinaan (*tarbiyah*), pengkaderan, mengirim para Da'i ke berbagai pelosok desa, mengirim para siswa Indonesia untuk studi ke negara-negara di Timur Tengah, membangun basis-basis kekuatan umat Islam. Masjid, kampus dan pesantren menjadi basis-basis pengkaderan umat; menjadi pabrikasi kader-kader tangguh, da'i-da'i mumpuni,

<sup>8</sup> Muh. Rusdiyanta, *et. al*, Transnasionalisasi Ideologi: Kasus Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera (Jurnal Transnasional vol.4 No.3 Desember 2009, FISIP universitas Budi Luhur), hal.19

<sup>9</sup> Anthony Bubalo, dkk, *PKS dan Kembarannya Bergiat Jadi demokrat Di Indonesia, Mesir, dan Turki*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2012), hal.47

yang bergerak melakukan perubahan-perubahan di masyarakat.<sup>10</sup>

Ide-ide Ikhwanul Muslimin berkembang dengan mengadopsi sistem usrah (keluarga) dari Ikhwanul Muslimin sebagai sarana menanamkan nilai-nilai baru ke mahasiswa muslim. Penekanan utama diletakkan pada kesalehan personal dan pembentukan kelompok-kelompok kecil yang di dalamnya bisa menumbuhkan kesadaran dan pola perilaku yang islami. Ide Islam yang menyeluruh (Islam Kaffah) yang berasal dari Ikhwanul Muslimin menunjukkan keyakinan terhadap Islam sebagai ideologi dan sistem nilai yang lengkap menjadi seruan dari gerakan ini yang kemudian dikenal dengan Jamaah Tarbiyah.

Berkembangnya gerakan Tarbiyah di Indonesia yang diilhami dari pemikiran Hasan al-Banna dapat dilihat melalui tiga fase yang dilakukan. Fase pertama, penyebaran gagasan melalui publikasi, ceramah, dan seminar intelektual. Fase kedua, melalui aktivitas organisasi sosial religius sejak awal 1980-an, khususnya melalui gerakan Tarbiyah di kampus-kampus. Fase ketiga adalah pergerakan ke politik praktis melalui aktivisme politik langsung sejak 1998. Setelah jatuhnya Soeharto pada 21 Mei 1998, jajaran pemimpin Tarbiyah bergerak cepat dengan membentuk partai baru. Partai tersebut kemudian diberi nama Partai Keadilan (1998-2003), dan akhirnya menjadi PKS pada tahun 2003 hingga saat ini.<sup>11</sup>

## Kerangka Teori

Menurut Munawir Sjadzali terdapat tiga hal yang melatarbelakangi munculnya pemikiran politik Islam kontemporer. *Pertama*, kemunduran dan kerapuhan dunia Islam yang disebabkan oleh faktor-

<sup>10</sup> Artawijaya, *Belajar Dari Partai Masjumi*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hal. 32

<sup>11</sup> Lihat Anthony Bubalo, dkk, *Op Cit*, hal.47-50

faktor internal, dan yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian. *Kedua*, rongrongan Barat terhadap keutuhan kekuasaan politik dan wilayah dunia Islam yang berakhir dengan dominasi atau penjajahan oleh negara-negara Barat atas sebagian besar wilayah dunia Islam, dengan akibat rusaknya hubungan yang selama ini baik antara Islam dan Barat, dan berkembangnya di kalangan umat Islam semangat permusuhan dan sikap anti Barat. *Ketiga*, keunggulan Barat dalam bidang ilmu, teknologi dan organisasi.<sup>12</sup>

Maraknya kemunculan gerakan kebangkitan Islam yang berideologi transnasional di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia yang kemudian dibingkai dalam format gerakan keislaman adalah sebuah hakikat sejarah yang tidak bisa dibantah. Ia merupakan gerakan global sebagaimana lazimnya globalisasi ekonomi, Informasi teknologi, dan globalisasi lainnya.<sup>13</sup>

Dalam sebuah buku yang bertajuk *Transnational Islam in South and Southeast*, Norhaidi Hasan membagi manifestasi Islam transnasional dalam empat kategori; *pertama* yang berorientasi sufisme, mereka adalah kelompok yang mencoba mengikuti Rasulullah secara utuh, misalnya saja Jamaah Tabligh. *Kedua*, adalah gerakan kesalehan; *Ketiga*, adalah gerakan politik; dan *keempat*, adalah gerakan charity. Norhaidi Hasan menambahkan bahwasanya empat kategori tersebut merupakan tipe gerakan Islam transnasional yang non-radikal.<sup>14</sup>

Kemunculan gerakan keislaman yang berideologi transnasional di

Indonesia adalah kelanjutan dari gerakan keislaman yang pernah muncul sebelum era kemerdekaan Indonesia. ideologi transnasional yang kemudian bermetamorfosis menjadi gerakan atau organisasi keislaman yang kemudian menjelma menjadi gerakan perlawanan politik terhadap penjajahan Belanda, Portugis, dan Jepang.<sup>15</sup>

Gerakan keislaman yang muncul sejak permulaan abad 19 tidak pernah berhenti karena berhentinya penjajahan. Seorang orientalis Barat, Lothrop Stoddard berusaha menyingkap rahasia di balik kemunculan berbagai pergerakan kebangkitan keislaman. Kesimpulan Lothrop Stoddard adalah : “Hakikat mendasar bagi munculnya perlawanan bangsa Indonesia pada substansinya adalah hakikat perlawanan umat Islam yang disinari oleh gerakan salaf, dan dari sanalah semua gerakan modern dan gerakan nasional terpengaruh secara massif.” Di antara gerakan salaf yang mampu memberikan inspirasi bagi munculnya gerakan pembaharuan keislaman di Indonesia adalah gerakan pembaharuan Islam.<sup>16</sup>

Menurut Stephan K. Sanderson, gerakan sosial keagamaan disebut juga gerakan revitalisasi atau millenarian. Dalam hal ini berarti gerakan keislaman tersebut berarti merupakan gerakan keagamaan. Revitalisasi berarti sebuah upaya untuk menciptakan eksistensi yang baru atau yang direvitalisasi yang disesuaikan dengan keadaan yang lebih baik. Gerakan revitalisasi atau millenarian secara khusus terjadi dalam kondisi ketegangan atau krisis sosial yang ekstrem, dalam suatu masa perubahan sosial yang cepat ketika orang-orang terbangun dan mengalami dis-orientasi seperti ketika terjadi penindasan dan eksploitasi dan mencapai batas-batas yang tak dapat ditolerir. Dalam kondisi-kondisi demikian

<sup>12</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikirannya* (Jakarta: UI-Press, 1993), hal.115

<sup>13</sup> Ali Fikri Noor dalam *Politik Islam Berbasis Ideologi Transnasional Sebuah Keniscayaan*.

<sup>14</sup> Syamsul Arifin, *Nalar multi kulturalisme kebangsaan dalam merespon gerakan-gerakan Islam transnasional di Indonesia* (PSIF-UMM, 13 April 2013)

<sup>15</sup> Ali Fikri Noor, *Op Cit*

<sup>16</sup> *Ibid*

gerakan-gerakan millenarian cenderung timbul ketika orang diresahkan oleh apa yang terjadi atas diri mereka.<sup>17</sup>

Banyak diantara para pemikir politik Islam kontemporer yang tidak menyetujui konsepsi tentang sistem politik Islam, melainkan konsepsi perjuangan politik umat Islam terhadap kezaliman penguasa, lebih-lebih terhadap imperialis dan kolonialis Barat. Pada umumnya para pemikir Islam kontemporer berorientasikan pembaruan dan pemurnian Islam dengan berbagai nuansanya. Tetapi dalam hal ketatanegaraan di antara mereka timbul berbagai aliran.<sup>18</sup>

Muhammad Iqbal serta Amin Husein Nasution membedakan 3 macam kelompok pemikir politik Islam. *Kelompok pertama*, disebut dengan integralis, menganggap bahwa Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk politik. *Kelompok kedua*, disebut sekuleristik yang berpendapat bahwa Islam dan politik adalah dua hal yang berbeda. Sementara *kelompok ketiga*, berpendapat bahwa Islam hanya memberikan seperangkat nilai-nilai politik yang harus diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi ummatnya, karena itu ummat Islam dapat mengadopsi pemikiran politik Barat sejauh tidak bertentangan dengan Islam.<sup>19</sup>

Islam sebagai *dien* (petunjuk) pandangan hidup (*worldview*), tentu memiliki prinsip-prinsip untuk terbentuknya suatu ideologi yang bersesuaian dengan ajaran Islam.<sup>20</sup> Ciri

ideologi adalah cita-cita yang dalam dan luas, bersifat jangka panjang, malah dalam hal-hal dasar bersifat universal atau diyakini bersifat universal.<sup>21</sup> Islam bukan ideologi tetapi dapat menjadi ideologi. Namun setelah menjadi ideologi, Islam akan berubah fungsi sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan. Islam yang menjadi ideologi akan mereduksi Islam sederajat dengan karya filsafat manusia.<sup>22</sup> Ideologi Islam menjadikan manusia harus memahami fungsinya diturunkan ke muka bumi sebagai *kalifah* (wakil) atau mandataris atau pemegang amanah. ini menjadikan akal, rasio, perasaan dan kemauan sesuai dengan ideologi yang hak. Artinya keyakinan dibangun atas nilai-nilai universal, menghancurkan kemungkar, meluruskan kesalahan meninggalkan keburukan, korup dan rakus, serta membersihkan perilaku yang menghalalkan segala cara.<sup>23</sup>

## Pembahasan

Bayang Ikhwanul Muslimin senantiasa berada dalam PKS, walaupun dalam AD/ART PKS tidak tertulis keterkaitan dengan Ikhwanul Muslimin. Namun dengan melihat variabel-variabel seperti konsep, pola dan metode perjuangan tak jarang PKS disebut sebagai Ikhwanul Muslimin Indonesia.

## Alur Infiltrasi Pemikiran Hasan al-Banna dalam Partai Keadilan Sejahtera

Kebangkitan Islam yang terjadi pada tahun 1970-an yang juga memperkuat peradaban Islam di seluruh dunia sebagaimana dinyatakan oleh

<sup>17</sup> Muh. Rusdiyanta, *et. al*, Transnasionalisasi Ideologi: Kasus Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera (Jurnal Transnasional vol.4 No.3 Desember 2009, FISIP universitas Budi Luhur), hal.17

<sup>18</sup> Munawir Sjadzali, *Op Cit*, hal.115

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Op Cit* hal.56

<sup>20</sup> Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia ke-3*, hal.296

<sup>21</sup> *Ibid*, hal.298

<sup>22</sup> Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam politik Orde Baru* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal.40

<sup>23</sup> Firdaus Syam, *Op Cit*, hal.301

Samuel P. Huntington adalah sebagai berikut:

“Sebuah keterikatan yang sangat dalam dengan identitas serta unitas orang Islam dalam konteks yang lebih jauh, distimulir oleh adanya dekolonialisasi, pertumbuhan penduduk, industrialisasi, urbanisasi dan perubahan tatanan ekonomi internasional yang diasosiasikan dalam beberapa hal, kekayaan minyak dikalangan negara-negara Islam yang tersimpan dibawah tanah, sarana komunikasi modern tampaknya mampu dan mengelaborasi ikatan-ikatan yang mempersatukan umat Islam. Terjadinya kenaikan jumlah umat Islam yang melakukan ibadah haji ke Mekkah, menjadi sebab lahirnya “rasa identitas”.....Meningkatnya jumlah mahasiswa Indonesia, Malaysia yang belajar di universitas-universitas Timur Tengah, penyebaran ide-ide dan hubungan personal lintas bangsa melalui pelbagai konferensi dan saling komunikasi yang terjadi dikalangan intelektual Muslim,...melintasi batas-batas antar bangsa dan para da’i pun mampu menjangkau pendengar mereka yang berada jauh di luar wilayah mereka”.<sup>24</sup>

Berdasarkan apa yang dipaparkan Samuel P. Huntington, terjadinya infiltrasi pemikiran Hasan al-Banna dapat disimpulkan disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor luar negeri, dan dalam negeri.

#### 1. Faktor dari Luar Negeri

##### a. Kenaikan harga minyak dunia

Pemerintah Arab Saudi membutuhkan jasa pekerja profesional dalam mengelola dana yang berlimpah untuk memperbaiki berbagai sektor kehidupan, salah satunya pendidikan dengan merekrut anggota Ikhwanul

Muslimin. Anggota Ikhwanul Muslimin kemudian mendesain sistem pendidikan dan kurikulum di sekolah-sekolah dan universitas-universitas negeri Arab Saudi. Tidak heran kenapa kemudian para alumni Timur Tengah mendapat pengaruh model aktivisme dan pemikiran gerakan Ikhwanul Muslimin. Abu Ridho, salah satu mahasiswa yang pada masa itu ke Arab Saudi untuk kuliah agama, menceritakan bahwa sebagian besar buku di perpustakaan-perpustakaan universitas pada 1970-an ditulis oleh aktivis Ikhwanul Muslimin.<sup>25</sup>

##### b. Hubungan Liga Dunia Islam dengan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII)

Hubungan Liga Dunia Islam dengan DDII yang semakin erat serta melambungnya harga minyak pada 1970-an menjadi momentum utama muara masuknya pemikiran Hasan al-Banna di Indonesia. Karena kedua faktor tersebut menjadikan semakin besarnya dana yang ditujukan bagi program-program beasiswa untuk studi-studi agama ke Timur Tengah. Alhasil semakin banyak mahasiswa yang memiliki hubungan dekat dengan DDII dikirim oleh M.Natsir untuk melanjutkan studi-studi agama di Timur Tengah. Hal inilah yang menjadikan pemikiran Ikhwanul Muslimin sampai di Indonesia, sebab para warga Indonesia yang kembali ke Indonesia dari Timur Tengah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dan metode-metode perjuangan Ikhwanul Muslimin.

<sup>24</sup> Muh. Rusdiyanta, *et. Al, Op Cit*, hal.19

<sup>25</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Dilema PKS; Suara dan Syariah*, hal.97-98

- c. Hubungan bilateral Indonesia dengan kerajaan Arab Saudi dalam bidang pendidikan

Dari hubungan ini, kerajaan Arab Saudi kemudian mendirikan lembaga pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) di Jakarta pada 1980. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, para pengajar di LIPIA kebanyakan dipengaruhi oleh gagasan dan pemikiran Ikhwanul Muslimin. Koleksi buku di perpustakaan LIPIA juga sebagian ditulis oleh ideolog-ideolog Ikhwanul Muslimin. Mahfudz Sidiq mengatakan bahwa LIPIA berperan penting dalam menyebarkan bukan hanya pemikiran melainkan juga model gerakan Ikhwanul Muslimin (*manhaj haraki*) di Indonesia.<sup>26</sup>

- d. Pertautan erat antara kelompok revivalis Indonesia dengan kelompok revivalis Malaysia pada awal 1970-an
- Sejumlah tulisan Sayyid Quthb, Hasan al-Banna, dan ideolog revivalisme Islam lain diterjemahkan dalam bahasa Melayu, terutama oleh Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM). Sehingga mahasiswa kampus-kampus sekuler Indonesia yang tidak memiliki kemampuan berbahasa Arab sangat terbantu dengan hadirnya buku-buku terjemahan tersebut. Buku-buku tersebut dibawa ke Indonesia oleh Imaduddin Abdulrahim yang menjadi dosen Universiti Teknologi Malaysia (UTM) di Kuala Lumpur<sup>27</sup>

## 2. Faktor dari Dalam Negeri

- a. Sikap represif pemerintahan Orde Baru
- Ketika represi terhadap kelompok politik Islam dan depolitisasi mahasiswa melalui program NKK/BKK

mencapai puncaknya pada tahun 1980-an, muncul beberapa kegiatan mahasiswa seperti kelompok-kelompok kajian dan aktivitas lembaga swadaya masyarakat (LSM). Bentuk aktivisme yang muncul pada periode ini yang paling populer adalah dakwah kampus dengan menjadikan masjid kampus sebagai basis gerakan dakwah.<sup>28</sup>

Dakwah kampus ini kemudian yang menjadi benih awal Jamaah Tarbiyah di Indonesia.

- b. Aktivitas dakwah DDII di perguruan tinggi

DDII sangat berperan vital dalam pengembangan gerakan dakwah kampus. Kegiatan dakwah DDII di kampus-kampus merupakan wahana mencetak pemimpin muslim masa depan dengan pendekatan Islam dalam kehidupan publik. Selain itu, Imaduddin Abdulrahim (Bang Imad) juga mengambil peranan penting dalam penyebaran ide-ide Ikhwanul Muslimin. Setelah kepulangannya pada tahun 1974 di bawah bimbingan M.Natsir, Bang Imad menjadi Inisiator lahirnya Lembaga Mujahid Dakwah (LMD). Bang Imad kemudian aktif melakukan pelatihan-pelatihan keagamaan dan training inovatif untuk mahasiswa di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung (ITB). Program Bang Imad dibangun dari unsur pemikiran Hasan al-Banna, seperti pentingnya kaderisasi yang disiplin, dan mempersiapkan mahasiswa untuk berkecimpung dalam dakwah dan aktivisme dengan model baru.<sup>29</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*, hal.99

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.99-100

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> Anthony Bubalo, dkk, *Op Cit*, hal.48

Aktivitas dakwah kampus tersebut terus berkembang sepanjang 1980-an dan 1990-an dengan struktur organisasi utamanya adalah *usrah*.<sup>30</sup> Aktivitas dakwah kampus ini kemudian semakin berkembang dan melembaga secara resmi pada pertengahan 1980-an menjadi Lembaga Dakwah Kampus (LDK). LDK kemudian semakin berkembang hingga mencapai level nasional lalu dengan rutin mengadakan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK).

Sebagai respon terhadap krisis nasional yang sedang terjadi, maka pada FSLDK ke X ini, para peserta pertemuan membentuk wahana baru bagi aksi-aksi politik sebagai bentuk peran dan tanggung jawab sosial politik para aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK).<sup>31</sup> Pada akhir acara FSLDK yang juga dihadiri beberapa tokoh nasional tersebut maka dideklarasikan berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).<sup>32</sup>

KAMMI muncul sebagai gerakan mahasiswa yang cukup diperhitungkan dan paling vokal menyuarakan reformasi hingga runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Pasca berakhirnya rezim Orde Baru, Jamaah Tarbiyah pun kemudian terlibat aktif dalam perpolitikan tanah air. Hal tersebut ditandai dengan Deklarasi berdirinya Partai Keadilan (PK) pada 9 Agustus 1998 di lapangan Masjid al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta.<sup>33</sup>

Dalam keikutsertaan yang pertama pada pemilu tahun 1999, PK berhasil menjaring 1.436.565 suara atau sekitar 1,43% dari keseluruhan jumlah suara. .

namun perolehan suara tersebut tidak menjadikan PK lolos ketentuan *electoral threshold* dengan batas 2% untuk mengikuti pemilu berikutnya. Pada 20 April 2002 PKS secara resmi berdiri. Kemudian berdasar Musyawarah Majelis Syura Partai Keadilan ke XIII yang berlangsung di Wisma Haji Bekasi, Jawa Barat, pada 17 April 2003, memutuskan Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera.<sup>34</sup> Sejatinya, perubahan PK ke PKS hanyalah semata-mata perubahan nama untuk menyiasati agar bisa mengikuti Pemilu 2004. Oleh karena itu, suprastruktur (ideologi, pemikiran, dan konsep-konsep partai), maupun infrastruktur PKS (baik berupa jaringan kader, kepengurusan hingga aset-aset partai) adalah pelimpahan PK.<sup>35</sup>

## Bentuk Pengaruh Pemikiran Hasan al-Banna dalam Partai Keadilan Sejahtera

### 1. Konsep Tarbiyah

Tarbiyah merupakan sebuah konsep pembinaan yang dikembangkan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin, sebuah pembinaan yang kemudian menjadi konstituen PKS. Landasan filosofis, ideologis, dan *mabda'* keagamaan yang diadopsi PKS dari Ikhwanul Muslimin bersumber dari prinsip bahwa pendidikan Ikhwanul Muslimin adalah Islami dan bersumber dari Islam yang tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan sedikit pun.

Mengenai *manhaj* dan pentahapan, PKS mengadopsi pendekatan *tadarruj* (gradual) yang diterjemahkan dalam pentahapan yang dirumuskan Ikhwanul Muslimin, yakni *ta'rif* (pengenalan), *takwin* (pembinaan), *tanfidz* (pelaksanaan), dan *tamkin* (pengokohan).<sup>36</sup> Sedangkan sebagai sarana tarbiyah atau pendidikan

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Mahfudz Sidiq, *Op Cit*, hal.28

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> Yanuardi Syukur, *Tikar Pak Hidayat*, hal.40

<sup>34</sup> *Ibid*

<sup>35</sup> M.Imdadun Rahmat, *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*, hal.39

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.243

bagi para kadernya, PKS melakukan adaptasi dari perangkat yang digunakan oleh Ikhwanul Muslimin dengan memakai sarana usroh/halaqah, *daurah* (ceramah), taushiah (ceramah singkat), penugasan, seminar, bedah buku, *mukhyyam* (kemah), *mabit* (bermalam), *rihlah* (berwisata), baca buku, taklim rutin partai, *tarhib* (ibadah khusus) Ramadhan, dan kajian fiqh.<sup>37</sup> Namun, dari semua perangkat tarbiyah tersebut, hal yang merupakan inti dan paling berperan dalam pendidikan kader PKS adalah adalah sistem Usrah yang kemudian diganti nama menjadi Halaqah. Perangkat tarbiyah ini menjadi utama karena di dalamnya juga berlangsung perekrutan atau pengakderan anggota baru.

Berkaitan dengan target dan tujuan tarbiyah, PKS mengadopsi penuh dari perumusan Ikhwanul Muslimin. Dalam modul Manajemen Tarbiyah Anggota Pemula dikemukakan bahwa tarbiyah diharapkan menghasilkan para peserta yang memiliki kriteria tertentu terkait dengan aqidah yang lurus (*salimul aqidah*), ibadah yang benar (*shalihul ibadah*), akhlak yang baik (*matinul khuluq*), berkemampuan produktif (*qadirun ala al-kasbi*), berwawasan luas (*mustaqqaful fikri*), berbadan kuat (*qawiyul jismi*), mampu memerangi nafsu (*mujahidun linafsihi*), mampu mengatur diri (*munaddlamun fi syu'unihi*), mampu mengatur waktu (*haritsun ala waqthihi*), dan bermanfaat bagi orang lain (*nafi'un li ghairihi*).<sup>38</sup>

## 2. Tahapan-Tahapan Perjuangan Dakwah (*Gradualism Approach*)

Sejak tahun 1980-an Dalam pikiran Tarbiyah-PKS, terdapat dua unsur terkait yang mendominasi: *pertama*, determinasi mengislamkan secara utuh bukan hanya kehidupan individual muslim namun juga masyarakat dan politik. Proses mengislamkan sosial masyarakat luas dan

politik tampak jelas dalam konsep tarbiyah, dimana grup halaqah dicirikan sebagai unsur dasar untuk membangun masyarakat Islami yang ta'at. *Kedua*, pemahaman bahwa perubahan membutuhkan pendekatan bertahap dan jangka panjang.<sup>39</sup> Sementara untuk tahapan-tahapan dalam melakukan perubahan, PKS membaginya dalam beberapa tahapan perjuangan dakwah.

Hasan al-Banna menyusun tahapan dakwah yang terdiri dari beberapa fase, yaitu: fase *ta'rif* (promosi dan pengenalan), fase *takwin* (penyiapan dan pembentukan), fase *tanfidz* (amal dan mobilitas), fase *daulah* (pembentukan beberapa negara yang memiliki referensi dan pemikiran yang sama), fase persiapan menuju khilafah, fase pengembalian eksistensi kenegaraan atau khilafah, fase *ustadziyah* (kepeloporan dunia).<sup>40</sup>

Dengan mengembangkan pendekatan pemikiran Hasan al-Banna ini, dapat dilihat dakwah PKS juga dilakukan melalui proses yang *gradual* atau bertahap. *Manhaj* dakwah PKS terdiri dari *mihwar ta'sisi* (medan pembentukan individu), hal ini sudah dimulai dengan pengkaderan dan proses tarbiyah yang panjang. Hal ini dapat dilihat grup halaqah yang dicirikan sebagai unsur dasar untuk membangun individu yang ta'at. Modal SDM keluaran Tarbiyah ini merupakan modal politik yang sangat penting bagi PKS dalam menjadi kekuatan politik dominan.

*Mihwar tanzhimi* (medan pengorganisasian), yaitu membangun sebuah organisasi yang kuat dan solid sebagai kekuatan utama yang mengoperasikan dakwah. Karena organisasi ini adalah tulang punggung dakwah, maka ia harus diisi oleh kader-kader yang kuat dan tangguh dalam

<sup>39</sup> Anthony Bubalo, dkk, *Op Cit*, hal.58

<sup>40</sup> Abdul Hamid Al-Ghazali, *Pilar-Pilar*

*Kebangkitan Umat; Intisari Buku Majmu'atur Rasail*, hal.146

<sup>37</sup> M. Imdadun Rahmat, *Op Cit*, hal.243

<sup>38</sup> *Ibid*

seluruh aspek kepribadian. Fase ini dilalui PKS bahkan pada saat masih dalam bentuk gerakan keagamaan Jamaah Tarbiyah. *Mihwar sya'biy* (medan kemasyarakatan), Fase *mihwar sya'biy* (medan kemasyarakatan) yaitu membangun basis sosial yang luas dan merata sebagai kekuatan pendukung dakwah, yang ingin dicapai pada tahap ini adalah terbentuknya opini publik yang Islami, struktur budaya dan adab-adab sosial yang Islami serta dominasi figur dan tokoh Islami dalam masyarakat. Dukungan yang di raih oleh PKS dalam setiap pemilu menunjukkan PKS telah berhasil melalui tahapan ini. Sebagai partai yang diisi oleh kader-kadernya yang muda, PKS berhasil tampil menjadi salah satu partai politik Islam yang diperhitungkan.

*Mihwar muasasi* (medan konstitusional) yaitu membangun berbagai institusi untuk mewartakan pekerjaan-pekerjaan dakwah di seluruh sektor kehidupan dan diseluruh segmen kehidupan. kalau dalam tahapan pembentukan basis sosial PKS menyebarkan kader-kader dakwah kedalam masyarakat sosial, dalam tahapan institusi kita menyebar kader ke institusi yang ada. Kader-kader harus mampu mengisi struktur yang ada di lembaga tinggi negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Elektabilitas PKS dalam pemerintahan ini menunjukkan bahwasanya PKS telah melalui tahapan ketiga dari tahapan perjuangan dakwah dan masuk pada fase *mihwar muassasi*.

*Mihwar dauli* (medan kenegaraan). yang merupakan tahapan yang sangat kompleks. Dakwah harus sampai pada tahapan negara pasalnya institusi negara dibutuhkan dakwah untuk merealisasikan secara legal dan kuat seluruh kehendak Allah SWT atas kehidupan masyarakat.<sup>41</sup>

Melalui jalur pemerintahan, hal-hal yang bernuansa Islami kemudian diperjuangkan oleh PKS melalui kader-kadernya di pemerintahan. Sebut saja Menteri Komunikasi dan Informasi periode 2009-2014, Tifatul Sembiring yang menyatakan perang terbuka dan sistematis terhadap pornografi.<sup>42</sup> Selain itu, PKS juga turut berada di garis depan mengusung penerapan syariah dalam kehidupan publik dan produk-produk legislasi lainnya yang bersifat konservatif. Gejala ini terlihat dari kuatnya dukungan partai untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti-Pornografi dan Sistem Pendidikan Nasional.<sup>43</sup>

Begitu juga dukungan kader-kader PKS di parlemen maupun melalui aksi demonstrasi yang menuntut penerapan perda bernuansa syariah di berbagai provinsi dan kabupaten/kota seperti di Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, dan Sulawesi Selatan. Perda berbasis syariah ini bermacam-macam bentuknya seperti aturan tentang pakaian Islami di kantor-kantor pemerintahan, kewajiban membaca Al-Qur'an, larangan minum alkohol, judi, larangan perempuan keluar malam, penertiban lokalisasi pelacuran, dan lain-lain.<sup>44</sup>

### 3. Ideologi Islam (Universalitas Islam)

Sebagai partai yang lahir dari rahim gerakan dakwah, memperjuangkan nilai-nilai Islam menjadi prioritas bagi PKS. Bagi PKS, dakwah harus sampai pada tingkat negara karena institusi negara dipandang mampu merealisasikan secara legal dan kuat seluruh kehendak Allah atas kehidupan masyarakat.<sup>45</sup> Landasan konsep Negara bagi PKS memuat dua elemen utama, yakni. *Pertama*, Paradigma bertahap (*gradualism approach*). *Kedua*, keyakinan akan implementasi ajaran Islam

<sup>41</sup> Ahmad Satori, *et.al. Taujih Ri'ayah Ma'nawiyah Kader PK Sejahtera*, hal.27. Mengenai tahapan dakwah ini juga dapat dilihat dalam buku Anis Matta berjudul *Dari Gerakan ke Negara*

<sup>42</sup> Akmal Sjafril, *Op Cit*, hal.135

<sup>43</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Op Cit*, hal.182

<sup>44</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Op Cit*, hal.182

<sup>45</sup> Anis Matta, *Menikmati demokrasi*, hal.11

secara menyeluruh (*Syumuliyatul Islam*). Dalam doktrin ini Islam dipandang sebuah *way of life* yang mencakup seluruh bidang kehidupan, dimana antara satu bidang dengan bidang lainnya terintegrasi dalam satu totalitas keislaman. Kombinasi keduanya dalam jantung pemikiran PKS inilah yang pada akhirnya nanti menentukan corak pemikiran politik PKS yang berkomitmen menegakkan sistem Islam secara komprehensif dengan cara-cara toleransi, persuasif dan kontekstual.<sup>46</sup>

Menurut Abdi Sumaithi seorang deklarator PK/PKS yang juga dikenal sebagai ideolog Tarbiyah, mengemukakan bahwasanya PKS memang mencoba menyerap sebisa mungkin pemikiran-pemikiran Ikhwanul Muslimin yang bisa diterapkan di Indonesia, khususnya pemikiran-pemikiran politiknya. Salah satu konsep dasar yang diserap PKS dari Ikhwanul Muslimin adalah bahwa Islam bersifat universal.<sup>47</sup> Oleh karena itu, PKS memahami Islam sebagai aturan yang mengikat dalam hal *ubudiyah* (peribadatan), *mu'amalah* (interaksi antarmanusia) dan *siyasah* (politik kenegaraan).<sup>48</sup>

Bangunan ideologis PKS berpijak pada prinsip utama bahwa Islam merupakan konsep yang utuh dan sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam diwahyukan sebagai petunjuk bagi manusia untuk mengelola hidup dan kehidupan. Di sini Islam dipahami sebagai agama (*ad-din*), yakni sebuah tuntunan hidup dalam penghambaan dan penyerahan diri kepada Allah SWT dan sekaligus negara (*ad-*

*daulah*), tata aturan mengelola kehidupan dalam konteks kekuasaan.<sup>49</sup>

## Kesimpulan

Dari bahasan alur masuknya pemikiran Hasan al-Banna dalam PKS dan bentuk pengaruh pemikirannya terhadap PKS, dapat disimpulkan bahwa:

1. Arus informasi dan globalisasi tak ayal menjadikan pemikiran Hasan al-Banna yang berasal dari Timur Tengah sebagai *central* ajaran Islam dapat masuk di Indonesia sebagai *receiver* dalam ajaran dan pemikiran Islam. Masuk dan berkembangnya pemikiran tersebut dipengaruhi oleh faktor luar negeri, yaitu kenaikan harga minyak dunia, hubungan erat Liga Dunia Islam dengan DDII, hubungan bilateral Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia dalam pendidikan, serta hubungan kelompok revivalis Malaysia dengan Indonesia. Dari dalam negeri berkembangnya pemikiran Hasan al-Banna dipengaruhi oleh sikap represif pemerintah orde baru dan dakwah dan pengkaderan yang dilakukan oleh DDII.

2. Dalam Partai Keadilan Sejahtera, bentuk pemikiran yang berasal dari Hasan al-Banna dapat dilihat dalam:

1. Konsep Tarbiyah,

Sistem tarbiyah pertama kali diterapkan oleh Hasan al-Banna dalam mengembangkan Ikhwanul Musliminnya yang salah satu sarannya adalah *usrah* atau halaqah. *Usrah* juga berperan penting dalam pengkaderan dan proses bertambahnya jumlah kader. Dapat dikatakan bahwasanya Jamaah Tarbiyah maupun PKS dapat berkembang bukan karena sistem *usrah* atau halaqah ini. melalui tarbiyah ini juga PKS menjalankan fungsi partai.

<sup>46</sup> Muh. Rusdiyanta, *et. al*, Transnasionalisasi Ideologi: Kasus Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera (Jurnal Transnasional vol.4 No.3 Desember 2009, FISIP universitas Budi Luhur), hal.26

<sup>47</sup> M. Imdadun Rahmat, *Op Cit*, hal.121

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> M. Imdadun Rahmat, *Op Cit*

## 2. Metode Tahapan Perjuangan Dakwah

Baik Ikhwanul Muslimin maupun PKS menggunakan konsep perjuangan dakwah yang sama yaitu bertahap. Tahapan itu dimulai dari pembentukan individu melalui tarbiyahnya, kemudian mulai dengan pengorganisasian, lalu dapat diterima oleh masyarakat, hingga berjuang di dalam konstitusional dan medan kenegaraan. Secara sederhana tahapan itu berarti dimulai dari individu Islami, masyarakat Islami dan negara Islami.

## 3. Pemahaman Islam Universal (*Syumuliyatul al-Islam*)

Konsep Islam Universal yang dikembangkan menjadi ideologi perjuangan oleh Hasan al-Banna dalam gerakannya yang diadopsi oleh PKS menjadi landasan dakwahnya. Dengan nilai ini, PKS berupaya memperbaiki masyarakat secara Islami hingga ia mampu memperbaiki negaranya dan membangun peradaban dunia dengan nilai-nilai yang universal. Hal tersebut dimulai dari pribadi kadernya, keluarga, masyarakat, hingga negara.

Meskipun begitu, memang terdapat perbedaan antara PKS dengan Hasan al-Banna. Hasan al-Banna melalui Ikhwanul Muslimin bersifat lebih keras terhadap pemerintahan yang berkuasa, hal ini menyebabkan Ikhwanul Muslimin kerap bersinggungan dan mengalami konflik dengan pemerintah. Sementara PKS lebih menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan tidak memaksakan dijadikannya Syari'at Islam dengan segera atau berdirinya Negara Islam. Sebab bagi PKS, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan mengislamkan masyarakat terlebih dahulu.

### DAFTAR PUSTAKA

Al-Banna, Hasan. (2001). *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin 1*. Solo: Era Intermedia

Al-Ghazali, Abdul Hamid. (2001). *Pilar-pilar Kebangkitan Umat: Intisari Buku Majmu'attur Rasail*. Jakarta: Al-I'tishom

Artawijaya. (2014). *Belajar Dari Partai Masjumi*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Bubalo, Anthony, dkk. (2012). *PKS dan Kembarannya Bergiat Jadi demokrat Di Indonesia, Mesir, dan Turki*, Jakarta: Komunitas Bambu

Ilahi, Kurnia. (2012). *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Pekanbaru: Pustaka Riau

Iqbal, Muhammad & Nasution, A, H. (2013). *Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana

Matta, M. Anis. (2002). *Menikmati Demokrasi: Strategi Dakwah Meraih Kemenangan*, Jakarta: Pustaka Saksi

\_\_\_\_\_. (2006). *Dari Gerakan ke Negara*, Bandung : Fitrah Rabbani

Moesa, Maschan, Ali. (2002). *NU, Agama dan Demokrasi: Komitmen Muslim Tradisionalis Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan*, Surabaya: Pustaka Da'i Muda

Muhtadi, Burhanuddin. (2012). *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia

Qardhawi, Yusuf. (2006). *Metodologi Hasan Al-Banna dalam Memahami Islam: Ceramah-ceramah Yusuf Al-Qardhawi Tentang 20 Prinsip Hasan AL-Banna dalam Memahami Agama Islam*, Solo: Media Insani Press

Rahmat, M. Imdadun. (2008). *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKiS

Satori, Ahmad, et.al. (2004). *Taujih Ri'ayah Ma'nawiyah Kader PK Sejahtera*. Jakarta: Departemen Kaderisasi DPP Partai Keadilan Sejahtera

Sekamdo, Aga. (2004). *Membumikan Ikhwanul Muslimin: Studi Analisis*

*atas Proses Internasionalisasi Ikhwan*. Solo: Era Intermedia

- Sidiq, Mahfudz. (2003). *KAMMI dan Pergulatan Reformasi: Kiprah Politik Aktivis Dakwah Kampus dalam Perjuangan Demokratisasi di Tengah Gelombang Krisis Nasional Multidimensi*. Solo: Era Intermedia
- Siraj, Fuad Mahbub. (2012). *Ibn Rusyd Cahaya Islam Di Barat*, Jakarta: Dian Rakyat
- Sjadzali, Munawir. (1993). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press
- Sjafril, Akmal. (2013). *Geliat Partai Dakwah 1: Memasuki Ranah Kekuasaan*. Jakarta: Afnan Publishing
- Syam, Firdaus. (2007). *Pemikiran Politik Barat: Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syukur, Yanuardi. (2014). *Tikar Pak Hidayat*, Yogyakarta: Giga Pustaka
- Thaba, Abdul Azis. (1996). *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru (1966-1994)*, Jakarta:Gema Insani Press

### **Jurnal, Artikel, Makalah**

- Ali Fikri Noor, *Politik Islam berbasis Ideologi Trans-national Sebuah Keniscayaan*
- Muh. Rusdiyanta, *et. al. Transnasionalisasi Ideologi: Kasus Ikhwanul Muslimin terhadap Partai Keadilan Sejahtera*, (Jurnal Transnasional FISIP universitas Budi Luhur vol.4 No.3 Desember 2009)
- Syamsul Arifin, *Nalar Multi-kulturalisme Kebangsaan dalam Merespon Gerakan-gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Public Lectures Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer di Indonesia, 13 April, Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) Universitas Muhammadiyah Malang, Malang)

### **Internet**

- <http://www.erasuslim.com/berita/gerakan-dakwah/hasan-al-bana-dan-pikiran-politik-ikhwan-2.htm#.UTXW7aLIYns>
- <http://www.hidayatullah.com/read/2013/08/19/5931/hasan-al-banna-dan-kemerdekaan-indonesia.html>
- <http://www.kpu.go.id>
- <http://www.pks.or.id>